

## BAB V

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuji dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, belanja daerah dan kemiskinan tahun 2006 hingga 2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 18 tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2023, kemampuan keuangan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kab Nias Selatan.
2. Selama kurun waktu 18 tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2023, variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di Kab Nias Selatan. Dampak ini terlihat tidak cukup baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena kemandirian pada periode ini hanya sedikit, berkisar dibawah 5%
3. Dalam kurun waktu 18 tahun, yaitu tahun 2006 hingga tahun 2023, variabel belanja daerah mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan cukup besar terhadap kemiskinan di Kab. Nias Selatan
4. Hasil estimasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa variabel kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan belanja daerah

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kab Nias Selatan dalam jangka pendek sebesar 54,19%, dan dalam jangka panjang sebesar 79,75%, pada kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan belanja daerah secara bersamaan atau simultan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan upaya dalam menurunkan Tingkat kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah pemerintah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten dan kota agar meningkatkan penguatan kapasitas fiskal yang dapat dilakukan dengan cara optimalisasi penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan wajib pajak, wajib pajak daerah dan objek pajak di daerah. dan mengurangi ketergantungan terhadap ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat,.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus menjaga dan mengendalikan dana yang diberikan pusat serta peningkatan kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara perluasan kegiatan ekonomi yang dibarengi dengan pemetaan potensi penerimaan pendapatan daerah. Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah dapat dikelola secara transparan dan akuntabel agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Penyederhanaan sistem pemungutan suara, adanya sanksi dan penghargaan yang secara nyata dapat

meningkatkan peluang peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Pemerintah perlu meningkatkan Belanja pemerintah yang dapat memberikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan melalui penyediaan barang/jasa sosial dan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dengan hal itu diperlukan belanja pemerintah yang sangat besar untuk investasi pemerintah, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan transportasi. Ditahap menengah peran investasi dibutuhkan tetapi investasi swasta sangat tinggi, peran swasta sangat tinggi dapat terjadi kegagalan pasar sangat besar dan membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak. Pada selanjutnya pemerintah beralih dari penyediaan sarana ke aktivitas sosial seperti program kesejahteraan, dan kesehatan warga. Salah satu strategi pemerintah adalah Program Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) Bank Dunia yang menitikberatkan pada investasi di bidang kesehatan, pendidikan dasar, dan kesejahteraan sosial.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih banyak menggunakan variabel independen sebagai dalam melihat tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya diharapkan banyak memasukkan variabel independen yang terdapat pada bidang lainnya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya terkait kemiskinan di Kab. Nias Selatan.